

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kashmir merupakan wilayah yang telah diperebutkan oleh India dan Pakistan sejak tahun 1947 yang menciptakan konflik tanpa ujung.<sup>1</sup> India mengklaim Kashmir sebagai wilayahnya berdasarkan keputusan Maharaja Hari Singh untuk menggabungkan wilayah Kashmir dengan India setelah meminta bantuan untuk melawan militer Pakistan. Sedangkan klaim Pakistan didasarkan pada justifikasi *two nations theory* yakni Kashmir merupakan wilayah mayoritas muslim.<sup>2</sup> Kashmir dianggap sebagai salah satu tempat paling berbahaya di dunia karena tingginya intensitas konflik.<sup>3</sup> Setidaknya, lebih dari 90.000 pembunuhan terjadi di Kashmir.<sup>4</sup>

Di sisi lain, Kashmir memiliki alam yang sangat indah dan sumber daya alam melimpah.<sup>5</sup> Wilayah Kashmir merupakan tempat strategis untuk membangun pertahanan militer.<sup>6</sup> Kashmir juga memiliki tiga sungai besar yang menjadi sumber daya bagi Pakistan dan India yang memperebutkan pengelolaannya yaitu Sungai Jhelum, Chenab, dan Indus,<sup>7</sup> serta kaya akan hasil tambang seperti emas,

---

<sup>1</sup> William Dalrymple, "The Violent Legacy of Indian Partition," *The New Yorker*, 22 Juni 2015, diakses melalui <https://www.newyorker.com/magazine/2015/06/29/the-great-divide-books-dalrymple> 18 Februari 2020.

<sup>2</sup> Sankaran Kalyanaraman, "India and Pakistan: an Eternal Conflict!," *Institute for Defense Studies and Analyses* Vol. 9, No. 3 (2015): 168

<sup>3</sup> Mushtaq Ahmad Mir, "India-Pakistan: the History of Unsolved Conflicts," *IOSR-JHSS* Vol. 19, Issue 4, Ver. 2 (2014): 106.

<sup>4</sup> Khalil Ahmed Banday, "Kashmir: Paradise or a Barricaded Valley," *National Journal of Advanced Research*, Vol. 2 Issue 3 (2016): 1.

<sup>5</sup> Banday, 1.

<sup>6</sup> Jubaidi Pribadi, *Kashmir dan Timor Timur (Peran PBB)*, (Yayasan Pustaka Grafika: Jawa Barat, 1999), 40.

<sup>7</sup> Seema Sridhar, "Kashmir and Water: Conflict and Cooperation," *Asian Development Bank* (2004): 1-4.

batu zamrud dan batu delima.<sup>8</sup> Keunggulan Kashmir memperkuat keinginan kedua negara untuk menancapkan pengaruh dan memperebutkan wilayah tersebut.

Setidaknya India dan Pakistan telah terlibat sebanyak tiga kali perang terkait Kashmir yaitu pada 1947, 1965, dan 1971.<sup>9</sup> Pada tahun 1972 melalui Perjanjian Simla disepakatilah pembagian wilayah antara kedua negara dalam garis kontrol (*line of control/LoC*) berdasarkan hasil gencatan senjata pada 17 Desember 1971<sup>10</sup>. India menguasai wilayah Jammu, Ladakh, dan Lembah Kashmir, sedangkan Pakistan menguasai wilayah Azad Kashmir, Gilgit, dan Baltistan.<sup>11</sup> Sepanjang LoC tersebut juga telah ditempatkan sekitar satu juta tentara yang semakin menyulut dilema antara kedua negara.<sup>12</sup> Berbagai upaya resolusi telah dilakukan baik melalui intervensi PBB, cara bilateral, mandat plebisit, maupun mediasi pihak ketiga.<sup>13</sup> Namun, hingga saat ini konflik Kashmir tetap menjadi pusat konflik di kawasan.

Wilayah Kashmir yang diduduki oleh India mendapatkan otonomi khusus dari Konstitusi India melalui Artikel 370 berlaku sejak 26 Januari 1950.<sup>14</sup> Artikel 370 memberikan hak khusus bagi Kashmir untuk membuat hukumnya sendiri selain kebijakan pertahanan, luar negeri, dan komunikasi.<sup>15</sup> Status ini penting bagi Kashmir karena wilayah ini pada awalnya ingin merdeka yang hingga saat ini masih

---

<sup>8</sup> Aljazeera, "Kashmir and the Politics of Water," 11 Agustus 2011, <https://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/kashmirtheforgottenconflict/2011/07/20117812154478992.html> diakses pada 26 Februari 2020

<sup>9</sup> Takenori Horimoto, "India's Wars: the Indo-Pakistani Wars and the India-China Border Conflict," (International Forum on War History: Proceedings): 2015, 91-95

<sup>10</sup> Simla Agreement, 1972, Chapter 4.

<sup>11</sup> Holger Wenning, "Kashmir: a Regional Conflict with Global Impact," *New Zealand Journal of Public and International Law*, Vol. 1 No. 1 (2003): 200.

<sup>12</sup> Wenning, 200.

<sup>13</sup> Kalyanaraman, 173.

<sup>14</sup> Dr. Akashdeep Singh, "Article 370: A Permanently Temporary Provision," *IJRAR*, Vol.6, No. 1 (2019): 428.

<sup>15</sup> Surbi Gupta dan Shashi Bhusan Ojha, "Article 370 of the Indian and Constitution: A Study in Specific Reference to Legal Dimensions and Implications," *International Journal of Law*, Vol 4 Issu 3 (2018): 1-2.

dalam ketidakjelasan. Namun, India juga tidak ingin melepas Kashmir begitu saja karena Kasmir sangat penting dalam rencana nasional India sejak awal yaitu sebagai negara sekuler dengan demokrasi multi-etnis.<sup>16</sup>

Pada 16 April 2014, Narendra Modi bersama partai oposisi nasionalis Hindu *Bharatiya Janata Party* (BJP) memenangkan pemilu India dan mendominasi kursi parlemen sebanyak 282 dari 545 kursi. Kemenangan besar BJP pada pemilu kali ini tidak terlepas dari karisma seorang Narendra Modi yang telah dipromosikan oleh BJP sejak 13 September 2013.<sup>17</sup> Saat itu, Modi berjanji untuk mencabut Artikel 370 dari Konstitusi India,<sup>18</sup> meskipun pada awalnya ia mendapatkan penolakan dari beberapa politisi senior BJP seperti Sushma Swaraj dan mantan presiden Partai Murli Manohar Joshi karena dianggap sebagai seorang pemecah belah.<sup>19</sup>

Haluan kebijakan Modi terhadap Pakistan dan Kashmir juga mengalami pergeseran dibandingkan dengan dua perdana menteri India sebelumnya. Modi memiliki visi yang berbeda dan memutar balik arah perilaku India dari yang sebelumnya akomodatif menjadi lebih agresif serta lebih condong terhadap sikap koalisi daripada kooperasi yang terlihat dari penolakan untuk melakukan resolusi dialog dengan Pakistan terkait Kashmir.<sup>20</sup> Kuatnya peran Narendra Modi dalam

---

<sup>16</sup> A.Z. Hilali, "Historical Developments of the Kashmir Problem and Pakistan's Policy after September Eleven," *Perceptions*, (2004): 80.

<sup>17</sup> The National Institute for Defence Studies, "Chapter 5 India: The Foreign and Security Policy under Modi Government," dalam *East Asia Strategic Review 2015*, (Tokyo: The Japan Time, Ltd, 2015): 171.

<sup>18</sup> Kurshid Khan dan Pervaiz Iqbal Cheema, "Modi's Kashmir Policy: The Probable Consequence for the Security of South Asia," *Strategic Studies*, Vol. 37 No. 3, (2017): 3.

<sup>19</sup> Nicola Missaglia, "Unity in Diversity" or a Hindutva India?," dalam Ugo Tramballi dan Nicola Missaglia, *India: the Modi Factor*, (Milan: ISPI, 2018), 78-79.

<sup>20</sup> Kanti Bajpai, "Narendra Modi's Pakistan and China policy: Assertive Bilateral Diplomacy, Active Coalition Diplomacy," *International Affairs*, Vol. 93 Issue 1(2017): 74-78

kebijakan luar negeri India diistilahkan oleh para ahli sebagai ‘*Modi doctrine*’ yang termasuk ke dalamnya dimensi militer, geopolitik, dan keamanan.<sup>21</sup>

Ram Jethmalani, seorang pakar hukum senior India serta mantan Menteri Hukum dan Keadilan pada masa PM Vajpayee yang merupakan tim sukses Narendra Modi dalam Pemilu 2014 telah mengingatkan Modi perihal Artikel 370. Jethmalani mengatakan bahwa Artikel 370 bagaimanapun tidak dapat dihapus karena merupakan dasar dari Konstitusi India dan menekankan bahwa pemerintahan Kashmir tidak pernah mengajukan penghapusan Artikel 370.<sup>22</sup> Pencabutan Artikel 370 mendapat kecaman keras dari PM Pakistan, Imran Khan mengatakan bahwa “*Modi has committed a strategic blunder,*” Khan juga akan terus memperjuangkan permasalahan Kashmir ke dunia internasional.<sup>23</sup> Namun, Narendra Modi tidak mengindahkan hal tersebut dan bersikeras dalam posisinya bahwa pencabutan Artikel 370 merupakan langkah yang tepat dalam menciptakan pembangunan di Kashmir serta meredam terorisme yang berasal dari Pakistan.<sup>24</sup>

Pada tanggal 5 Agustus 2019, India resmi mencabut Artikel 370 pada konstitusinya. Narendra Modi berdalih bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk tindakan yang tepat karena adanya peningkatan protes, penangkapan massal, dan meningkatnya ketegangan dengan Pakistan. Modi membela keputusan tersebut

---

<sup>21</sup> Sreeram Chaulia, *Modi Doctrine: The Foreign Policy of India's Prime Minister*, (London: Bloomsbury Publishing, 2016), 10.

<sup>22</sup> The Economic Times, “BJP Is Quiet Since I Explained Article 370 to PM Narendra Modi, Says Ram Jethmalani,” 8 November 2014, diakses melalui: <https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/bjp-is-quiet-since-i-explained-article-370-to-pm-narendra-modi-says-ram-jethmalani/articleshow/45080515.cms>, 6 Desember 2020.

<sup>23</sup> Al-Jazeera, “PM Khan: Modi Has Committed ‘strategic blunder’ in Kashmir,” 14 Agustus 2019, diakses melalui: <https://www.aljazeera.com/news/2019/8/14/pm-khan-modi-has-committed-strategic-blunder-in-kashmir>, 6 Desember 2020.

<sup>24</sup> Dipanjan Roy Chaudhury, “Decision to Remove Article 370 Has Irked One Nation: PM Narendra Modi,” The Economic Times, 23 September 2019, <https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/decision-to-remove-article-370-has-irked-one-nation-pm-narendra-modi>, diakses pada 6 Desember 2020.



dengan alasan bahwa pencabutan otonomi akan membuat wilayah yang bergejolak menjadi lebih aman, “*a new era has begun*”.<sup>25</sup> Sejak beberapa akses vital dibatasi seperti internet dan telekomunikasi serta pemberlakuan jam malam, Kashmir telah mengalami kerugian ekonomi lebih dari US\$ 2.4 miliar.<sup>26</sup> Narendra Modi dianggap merusak visi Jawaharlal Nehru untuk menjadikan India sebagai negara sekuler.<sup>27</sup>

Pencabutan otonomi Kashmir ini bersifat inkonstitusional karena tidak mendapat dukungan dari rakyat Kashmir maupun rekomendasi Konstitusi Jammu dan Kashmir.<sup>28</sup> Kebijakan ini juga dapat memicu ketidakstabilan keamanan di kawasan serta memicu ketegangan antara tiga kekuatan nuklir yang turut mengklaim kawasan tersebut.<sup>29</sup> Hal ini telah memicu protes publik yang luas di Kashmir, para demonstran tidak meminta untuk pembangunan sosial-ekonomi seperti klaim Modi, namun mereka menyerukan untuk realisasi plebisit.<sup>30</sup> Walaupun kebijakan ini memiliki banyak resiko, hal ini menunjukkan bahwa Modi percaya ia telah melakukan strategi besar untuk mencapai kemenangan dalam konflik ini.<sup>31</sup>

---

<sup>25</sup> Jeffrey Gettleman, “Modi Defends Revoking Kashmir’s Statehood as Protests Flare,” *New York Times*, 8 Agustus 2019, <https://www.nytimes.com/2019/08/08/world/asia/kashmir-india-modi.html> diakses pada 21 Mei 2020.

<sup>26</sup> Rizky Jaramaya, “Ekonomi Kashmir Turun Drastis Sejak Akses Dibatasi,” *Republika.co.id*, 18 Desember 2019, <https://internasional.republika.co.id/berita/q2pe6y366/ekonomi-kashmir-turun-drastis-sejak-akses-dibatasi>, diakses pada 5 Juni 2020.

<sup>27</sup> Krishnadev Calamur, “Modi’s Kashmir Decision Is the Latest Step in Undoing Nehru’s Vision,” *The Atlantic*, 5 Agustus 2019, <https://www.theatlantic.com/international/archive/2019/08/india-moves-revoke-special-status-kashmir/595510/> diakses pada 1 Oktober 2020.

<sup>28</sup> Abhinav Chandrachud, “The Abrogation of Article 370,” *SSRN*, (2020): 2.

<sup>29</sup> Ahmed Saeed Minhas, Bashir Ahmad dan Masrur Alam Khan, “Seizing Kashmir’s Identity: Implications for the Global Peace and Stability,” *NDU Journal* (2019): 77.

<sup>30</sup> Sultan Ahmed Ali, “Demographic Changes: A Challenge to the Decolonization of Kashmir,” *International Journal of Social Sciences*, Vol. 6, Issue 1, (2020): 441.

<sup>31</sup> Ahaan Bagwe, “Modi’s Grand Strategy in Kashmir?,” *Foreign Policy Research Institute*, 23 September 2019, <https://www.fpri.org/article/2019/09/modis-grand-strategy-in-kashmir/>, diakses pada 13 Februari 2021.

Dalam melihat kasus pencabutan otonomi Kashmir, penulis melihat bahwa Narendra Modi memainkan peran yang dominan dengan pendekatan yang menarik untuk diteliti. Pertama, Narendra Modi mengesampingkan seorang ahli hukum senior yang menjadi tim suksesnya yang membantu dirinya naik ke tampuk perdana menteri India terkait wacana pencabutan Artikel 370. Narendra Modi juga mengesampingkan konsekuensi yang dapat ditimbulkan dari kebijakan pencabutan otonomi Kashmir baik secara domestik maupun internasional. Dalih Narendra Modi mengenai pembangunan pasca kebijakan tersebut menunjukkan hal yang berlawanan serta pengingkaran dari keinginan rakyat Kashmir. Untuk itu, penulis ingin melihat bagaimana gaya kepemimpinan Narendra Modi sehingga kebijakan ini dapat diberlakukan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Narendra Modi merupakan pemimpin yang memiliki dominasi yang kuat dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri India yang dikenal sebagai '*Modi doctrine*'. Dominannya pengaruh Narendra Modi juga terlihat dalam permasalahan Kashmir di mana Modi selalu menolak dialog resolusi terkait Kashmir dengan Pakistan. Selain itu, posisi ekstrem Narendra Modi juga terlihat dalam kebijakan pencabutan otonomi Kashmir pada tahun 2019 di mana ia secara konsisten tetap dalam pendiriannya untuk mencapai tujuan pencabutan otonomi Kashmir meski mendapat kecaman negara tetangga maupun masukan dari ahli hukum senior India, Ram Jethmalani yang juga merupakan tim suksesnya saat kampanye. Kemudian, kebijakan tersebut juga telah mencoreng citra India sebagai negara sekuler multi-etnis dan menimbulkan ketegangan di kawasan. Dalih Modi untuk menciptakan pembangunan di Kashmir hanya bertolak belakang dengan fakta lapangan yang ada.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti gaya kepemimpinan Narendra Modi terhadap kebijakan pencabutan otonomi Kashmir.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Dari penjelasan rumusan masalah di atas, pertanyaan penelitian yang ingin dijawab yaitu, bagaimana gaya kepemimpinan Narendra Modi yang melatarbelakangi kebijakan India mengenai pencabutan otonomi Kashmir tahun 2019?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan Narendra Modi yang melatarbelakangi kebijakan India mengenai pencabutan otonomi Kashmir.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, di antaranya:

1. Sebagai proses belajar bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan yang telah didapatkan di bangku perkuliahan.
2. Dari sisi akademis, penelitian ini menambah khazanah analisis individu dalam kebijakan luar negeri pada studi Hubungan Internasional.
3. Dari sisi praksis, penelitian ini menambah referensi kepustakaan terkait kebijakan luar negeri India.

### **1.6 Studi Kepustakaan**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa rujukan/referensi yang dijadikan studi untuk membantu memahami isu lebih dalam. Tulisan pertama adalah artikel jurnal yang berjudul *India, Pakistan, and the Kashmir Conflict*

*Dispute: Unpacking the Dynamics of a South Asian Frozen Conflict.*<sup>32</sup> Secara singkat tulisan ini menjelaskan bahwa konflik sengketa Kashmir antara India dan Pakistan merupakan konflik paling rumit pada masalah modern saat ini. Konflik kedua negara tersebut dicirikan sebagai *frozen conflict* atau konflik beku di mana konflik ini sangat sulit diurai dan telah berlarut-larut. Permusuhan kedua negara telah meluas menjadi konflik berkepanjangan dengan ancaman terus terjadinya kekerasan baru. Kompleksitas konflik juga diperdalam dengan adanya keterlibatan dukungan Pakistan terhadap teroris di Kashmir dan kontrol India yang ketat terhadap Kashmir yang mempengaruhi dinamika konflik.

Penulis juga menjelaskan tiga dinamika transformasional yang bisa terjadi pada konflik beku ini yaitu; *peaceful thawing*, *violent thawing*, dan *conflict withering*. *Peaceful thawing*, transformasi ini merupakan masa damai konflik dengan adanya upaya pencairan tensi seperti yang dilakukan oleh PM India pada tahun 1999 menghadiri Lahore Summit untuk membicarakan pendekatan kembali kepada Pakistan yang mana hal tersebut juga dilakukan untuk mengubah *image* menyimpang India dengan menurunkan peringatan sepanjang perbatasan India-Pakistan. *Violent thawing*, transformasi ini merupakan bentuk re-eskalasi konflik beku di mana terdapat babak-babak kekerasan antara kedua negara walau tidak membawa kepada transformasi konflik penuh dengan adanya perang terbuka yang tetap kembali pada bentuk *frozenness* dengan tingkat intensitas konflik yang lebih lemah. Setelah Perang Kargil pada tahun 1999, eskalasi yang terjadi pada kedua belah pihak diakibatkan oleh adanya aktor non-negara seperti pemberontak dan teroris di mana India menuduh Pakistan telah mensponsori terorisme di Kashmir.

---

<sup>32</sup> Samit Ganguly, dkk, "India, Pakistan, and the Kashmir Conflict Dispute: Unpacking the Dynamics of a South Asian Frozen Conflict," *Springer*, (2018): 1-18.



*Conflict withering*, bentuk pemutihan konflik ini adalah sebuah potensi dimana konflik Kashmir tidak lagi menjadi sentral dari permasalahan kedua negara karena adanya saling keuntungan yang bisa didapatkan sebab adanya pengaruh pembangunan eksternal sesuai dengan karakter pemimpin kedua negara dan adanya perkembangan asimetris India-Pakistan baik ekonomi dan militer. Namun, penulis berargumentasi bahwa transformasi ketiga tersebut tidak akan tercapai dalam waktu dekat karena isu Kashmir tetap menjadi isu sentral kedua negara.

Tulisan selanjutnya adalah artikel jurnal yang berjudul *The Modi's Factor: The Role of Narendra Modi's Idiosyncratic Factors in India's Foreign Policy Responses towards China Pakistan Economic Corridor*.<sup>33</sup> Tulisan ini mencoba untuk menjelaskan peran faktor idiosinkratik Narendra Modi sebagai PM India dalam merespon hubungan Tiongkok dan Pakistan dalam kerjasama *China-Pakistan Economic Corridor (CPEC)* dalam agenda jalur perdagangan ambisius Tiongkok yaitu *Belt and Road Initiative* yang menjadi penyebab memburuknya hubungan Tiongkok dan India dalam beberapa tahun terakhir. Sebenarnya, Narendra Modi sebelum dan setelah dirinya menjadi PM sangat mengagumi kedisiplinan dan kerja keras Tiongkok selama ini. Namun, kerjasama bilateral antara Tiongkok dan Pakistan ini akan menghubungkan Provinsi Xinjiang dan pelabuhan Gwadar di Pakistan yang mana akan melewati wilayah Kashmir yang diduduki oleh Pakistan. Hal tersebutlah yang membuat India menyatakan sikap oposisi terhadap proyek tersebut dalam beberapa kesempatan karena Kashmir merupakan daerah yang masih dipersengketakan hingga kini dan sikap Tiongkok

---

<sup>33</sup> Peter Sean Lie dan Anak Agung Banyu Perwita, "The Modi Factor: The Role of Narendra Modi's Idiosyncratic Factors in India's Foreign Policy Responses towards China Pakistan Economic Corridor," *Andalas Journal of International Studies*, Vol. 8 No. 2 (2019): 117-142.

yang hanya diam terhadap situasi kerjasama yang dibangun dengan Pakistan tersebut. Kemudian Narendra Modi mengambil inisiatif untuk mengadakan pertemuan dengan Xi Jinping yang membahas mengenai isu global, kawasan, maupun bilateral dan masalah kerjasama Tiongkok-Pakistan tersebut yang memperburuk hubungan keduanya. Penulis menggunakan faktor idiosinkratik seperti *personality*, *experience*, dan *belief/ideology*.

Temuan dari penelitian ini adalah kebijakan luar negeri India di bawah kepemimpinan Modi menunjukkan prinsip-prinsip perimbangan perdamaian dan kekuatan dengan mengoptimalkan diplomasi dan membangun kekuatan militer dan lebih proaktif dari pendahulunya. Modi percaya bahwa CPEC harus ditentang karena melanggar kedaulatan India dan wilayah integralnya. Persepsi ini menunjukkan pribadi Modi yang vokal dan tegas dalam menentang hal-hal yang menurutnya salah, hal tersebut menjelaskan faktor idiosinkratik Modi berkorelasi dengan respon kebijakan dalam menentang tegas CPEC seperti waktu mudanya Modi pernah menentang guru yang merokok di kelas karena menurutnya seorang guru harus menjadi contoh yang baik kepada muridnya. Ideologi utama Modi yang seorang India nasionalis juga berkontribusi dalam sikap tegasnya terhadap CPEC yang berusaha untuk mempertahankan posisi India terhadap isu-isu penting. Gaya kebijakan luar negerinya yang proaktif juga mendorongnya untuk mengunjungi Wuhan dan mengadakan pertemuan informal dengan Xi Jinping. Modi juga lebih suka menangani urusan luar negeri dengan prinsip keseimbangan *shanti* (perdamaian) dan *shakti* (kekuatan), yang menjelaskan ketangguhan India dalam menentang CPEC, dan inisiatif India untuk memperbaiki hubungan yang memburuk dan mengejar perdamaian dengan Tiongkok.

Tulisan selanjutnya adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Kurshid Khan dan Pervaiz Iqbal Cheema yang berjudul *Modi's Kashmir Policy: The Probable Consequence for the Security of South Asia*.<sup>34</sup> Dalam tulisan ini penulis melihat bahwa kebijakan India terhadap Kashmir dan Pakistan yang agresif dan kaku dapat membuat hubungan India dengan Pakistan dan rakyat Kashmir di wilayah yang diduduki oleh India jengkel dan dapat menimbulkan permasalahan pada seluruh kawasan tersebut. India telah menempatkan 700.000 tentara di Kashmir dan 300.000 tentara di ibu kota Srinagar yang menjadikannya kota paling termiliterisasi di dunia. Hal tersebut tak lepas dari kebijakan aneh yang diambil Modi yang bertentangan dengan pemerintahan Kongres Nasional India/*Indian National Congress* (INC) sebelumnya yang lebih memilih 'go slow policy'. Dalam kampanyenya Narendra Modi juga menjanjikan untuk mencabut artikel 370 India mengenai otonomi Kashmir.

Sejak Modi menjadi PM India, slogannya terhadap integrasi dan pembangunan ekonomi regional dibayangi oleh kebijakannya untuk meningkatkan kemampuan pertahanan India. Ia telah membawa birokrasi militer untuk memainkan peran yang lebih besar dalam proses kebijakan keamanan dan luar negeri. New Delhi telah terlibat diplomasi koersif dengan Pakistan yang bertujuan untuk mempengaruhi Pakistan untuk menyerah terhadap kebijakan luar negeri independennya termasuk kebijakan terhadap Kashmir. Narendra Modi juga menunjukkan sikap untuk menghindar dalam membahas Kashmir sebagai permasalahan lama yang belum terselesaikan dengan Pakistan. Hasil dari tulisan tersebut, menurut penulis permasalahan Kashmir tidak bisa dikesampingkan dan

---

<sup>34</sup> Kurshid Khan dan Pervaiz Iqbal Cheema, 1-21.

diabaikan terlalu lama. Bahkan miscalculasi yang dilakukan oleh India dalam mengejar tujuan kebijakan luar negerinya dapat memicu Pakistan untuk melawan dan menempatkan seluruh kawasan dalam masalah. Untuk itu, India dan komunitas internasional harus menyadari bahwa tidak ada strategi selain dialog yang melibatkan semua pihak pemangku kepentingan akan berhasil dalam menyelesaikan masalah yang sudah tertunda sejak lama tersebut.

Berikutnya adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Ershad Mahmud yang berjudul *Deconstructing Modi's Kashmir Policy, 2014-2018*.<sup>35</sup> Sejak naiknya Narendra Modi dan Partai BJP sebagai penguasa pemerintahan, mereka melakukan pendekatan yang agresif terhadap Pakistan dan menjanjikan pembangunan terhadap Kashmir yang diduduki oleh India namun dengan operasi militer. Tulisan ini melihat strategi yang dilakukan India dalam kurun waktu 2014-2018 baik dari segi politik, militer dan diplomatik terhadap Kashmir. Menurut penulis, kebijakan pembangunan tanpa pendekatan politik adalah sebuah negasi terhadap aspirasi politik sesungguhnya dari rakyat Kashmir yang diduduki oleh India dan pengingkaran akan hak-hak fundamental mereka.

Temuan dari penelitian ini adalah sikap India yang keras terhadap perlawanan dan retorika kelompok militan/teroris di Kashmir telah memunculkan banyak protes masif, yang disebut sebagai kebangkitan intifada ketiga. Janji kampanye Modi untuk mengintegrasikan kembali negara Jammu dan Kashmir (wilayah Kashmir yang diduduki oleh India) ke dalam Uni India, hal tersebut memperlihatkan permusuhan secara terbuka terhadap Pakistan. Sejak pembunuhan terhadap pria 22 tahun pejuang kemerdekaan Kashmir, Burhan Muzaffar Wani pada

---

<sup>35</sup> Ershad Mahmud, 1-15.



8 Juli 2016, diikuti oleh demonstrasi massal di mana lebih dari 120 warga sipil tewas dalam bentrokan dengan pasukan India. Hal tersebut membuat Kashmir menjadi perhatian dunia karena pelanggaran HAM tersebut dan memunculkan gelombang perlawanan dari kaum muda intelektual di sana. Walaupun demonstrasi besar-besaran yang telah terjadi di lembah Kashmir pada tahun 2016, India tetap menolak untuk meninggalkan langkah-langkah opresifnya tersebut. *Line of Control* (LoC) telah melihat hal-hal yang belum terjadi sebelumnya yaitu pelanggaran gencatan senjata di lain sisi hubungan India-Pakistan saat ini berada pada titik terendah.

Tulisan kelima oleh Shamsa Nawaz yang berjudul *Indian Efforts to Change the Demography of IOK (Indian Occupied Kashmir)*.<sup>36</sup> Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pergolakan yang terjadi karena rencana India untuk mengubah demografis IOK dan implikasinya. Pemerintah India melalui partai BJP telah memunculkan rencana pada April 2015 untuk memindahkan ratusan ribu pandit Hindu ke wilayah Kashmir yang diduduki oleh India, BJP telah lama berjanji untuk menyelesaikan pemindahan 200.000 hingga 300.000 umat Hindu di IOK. Rencana India tersebut mengindikasikan adanya keinginan untuk mengubah demografi IOK sebagai upaya untuk meraih kekuatan secara politik. Kashmir (IOK) sendiri saat ini memiliki 68.3% populasi Muslim dan selebihnya diikuti oleh Hindu dan Buddha. Konstitusi otonomi di IOK sebenarnya tidak membolehkan orang non-Kashmir untuk memiliki tanah di sana, sedangkan kebijakan India ini telah menunjukkan pencederaan terhadap konstitusinya sendiri. Tulisan ini dilihat melalui teori yang dikemukakan oleh Christian Leuprecht dan Jack A. Goldstone mengenai upaya

---

<sup>36</sup> Shamsa Nawaz, "Indian Efforts to Change the Demography of IOK," *Strategic Studies*, Vol. 37 No. 2. (2017): 40-57.

pengubahan demografi melalui *demographic engineering* dan *population engineering*.

Pada tahun 2016, kebijakan industri baru yang dikeluarkan oleh PM Narendra Modi telah memunculkan kontroversi di mana kebijakan tersebut memperbolehkan subjek non-Kashmiri untuk mendapatkan tanah sewaan selama 90 tahun untuk mendirikan industri di Jammu dan Kashmir. Hal ini ditujukan untuk membatasi wilayah muslim secara menyeluruh di lembah tersebut. Langkah tersebut akan membentuk daerah pemilihan Hindu dengan cara membentuk daerah pekerja migran. Kebijakan demografi India tersebut telah melanggar hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya orang Kashmir secara sistematis. *Demographic shuffle* yang dimainkan oleh pemerintah India juga bertujuan untuk mengikis Artikel 370 atas otonomi yang dimiliki oleh Kashmir. Kebijakan *demographic engineering* ini telah menempatkan umat Islam, Hindu, Sikh, dan Buddha pada perang di IOK dan melemahkan semangat Kashmiriat. Hal tersebut memperlihatkan manifestasi signifikan dari upaya pemerintahan Modi untuk menjadikan Kashmir sebagai wilayah integral India.

Tulisan terakhir berjudul *Xi Jinping's Leadership Style* oleh Shan Wei.<sup>37</sup>

Tulisan ini menjelaskan gaya kepemimpinan Xi Jinping yang merupakan Presiden Tiongkok dimana Xi menunjukkan gaya kepemimpinannya yang khas serta menunjukkan dominasi pribadinya dengan mengurangi otoritas para kader Partai Komunis lainnya dalam pengambilan keputusan. Presiden Xi juga menjadikan dirinya sebagai pemimpin populis dengan menggerakkan keseluruhan mesin

---

<sup>37</sup> Shan Wei, "Xi Jinping' Leadership Style," *East Asian Policy*, Vol. 8, (2016): 42-53.

propaganda partai negara untuk mempromosikan kepribadiannya. Xi Jinping juga dianggap sebagai pemimpin paling kuat setelah Mao Zedong.

Dengan sentralisasi kekuatan yang sangat besar kepada dirinya serta gaya kepemimpinan yang berbeda, hal tersebut mampu membantu Xi Jinping dalam melakukan reformasi yang tertunda lama termasuk dalam hal struktur ekonomi dan pembangunan di Tiongkok. Presiden Xi bahkan sering membuat keputusan besar tanpa konsultasi dengan 6 orang anggota Komite Politburo Partai Komunis lainnya dalam kebijakan luar negeri. Meskipun keras, Xi Jinping tetap mengedepankan fleksibilitas yang terlihat dari pertemuannya dengan Presiden Taiwan pada November 2015 di Singapura. Ia juga memiliki pandangan curiga terhadap nilai-nilai barat yang berujung pada pengawasan ideologi di universitas dan peningkatan kontrol negara terhadap media. Namun, gaya kepemimpinan Xi Jinping yang *one-man-rule* memiliki tanggung jawab kepada dirinya sendiri dan menjadi tantangan bagi dirinya untuk membawa perubahan terhadap Tiongkok.

Dari lima rujukan tulisan di atas, peneliti ingin memberi batasan terkait kontribusi dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada artikel jurnal pertama hanya berfokus pada konflik Kashmir itu sendiri yang menjelaskan bahwa konflik tersebut bersifat konflik beku (*frozen conflict*) di mana konflik tetap ada dan belum terselesaikan dan penggambaran aktor serta kompleksitas konflik tersebut. Tulisan kedua membahas mengenai peran faktor idiosinkratik Narendra Modi melalui kebijakan India dalam merespon kerjasama koridor ekonomi antara Tiongkok dan Pakistan di bawah agenda BRI yang mana menunjukkan bahwa Narendra Modi sebagai pemimpin politik India memiliki karakter yang tegas dan nasionalis yang tercermin dari perjalanan hidupnya yang kemudian diterapkannya

dalam gaya kepemimpinannya yang tercermin pada sikap tegasnya dalam memecah kerjasama tersebut karena menganggap jalurnya yang melintasi Kashmir dan mencederai wilayah integral India. Tulisan ketiga membahas mengenai kebijakan India terhadap Kashmir pada masa Narendra Modi yang menunjukkan penghindaran pembahasan mengenai Kashmir dan penggunaan diplomasi koersif terhadap Pakistan dan sikap opresif terhadap Kashmir. Dalam tulisan tersebut dikemukakan bahwa kebijakan India terhadap Kashmir di bawah pemerintahan Modi dapat menimbulkan konsekuensi terhadap keamanan kawasan.

Tulisan keempat membahas mengenai kebijakan Narendra Modi terhadap Kashmir yang mana melakukan kebijakan pembangunan tanpa pendekatan politik yang kemudian Pemerintah India terus menempatkan kekuatan militernya di Kashmir sehingga memunculkan protes masif dari rakyat Kashmir. Tulisan kelima membahas mengenai kebijakan relokasi pemukiman Hindu yang diinisiasi oleh pemerintahan Narendra Modi yang berusaha mengubah demografi yang ada di Kashmir. Tulisan keenam menjelaskan bagaimana gaya kepemimpinan Xi Jinping dalam pengaruh pengambilan kebijakan di Tiongkok dan reformasi dalam pembangunan di Tiongkok. Dari enam rujukan tulisan tersebut, belum ada yang membahas mengenai gaya kepemimpinan Narendra Modi sebagai PM India dalam kebijakan pencabutan otonomi Kashmir yang menjadikan wilayah tersebut masuk ke dalam dilema baru.

## **1.7 Kerangka Konseptual**

### **1.7.1 Kebijakan Luar Negeri**

Kebijakan luar negeri merupakan strategi yang disusun oleh suatu negara melalui pembuat kebijakan berdasarkan kepentingan nasional negaranya yang



ditujukan/dioperasikan dalam dinamika politik internasional untuk menghadapi entitas politik lain.<sup>38</sup> Wilkenfeld mengartikan kebijakan luar negeri sebagai tindakan resmi (dan reaksi) negara berdaulat yang menginisiasi (atau menerima dan selanjutnya bereaksi terhadap) untuk tujuan mengubah atau menciptakan suatu kondisi (atau masalah) di luar wilayah batas-batas kekuasaan mereka.<sup>39</sup> Holsti juga melihat bahwa kebijakan luar negeri termasuk ide-ide yang direncanakan oleh pembuat kebijakan secara berurutan untuk memecahkan masalah atau mempertahankan beberapa perubahan pada lingkungan, yang mana dapat berupa kebijakan, tingkah laku, atau tindakan negara lain.<sup>40</sup> Sedikit berbeda dengan itu, Modelski mendefinisikannya sebagai 'sistem kegiatan' yang dikembangkan oleh komunitas dengan untuk mengubah perilaku negara lain dan menyesuaikan dengan aktivitas mereka ke lingkungan internasional.<sup>41</sup> Secara sederhana, kebijakan luar negeri dapat diartikan sebagai tindakan yang dirancang oleh para pembuat kebijakan suatu negara untuk bereaksi terhadap lingkungan eksternalnya.

Dalam proses perumusan kebijakan luar negeri terdapat beberapa sumber masukan (input) utama yang dijelaskan oleh Russell Bova dalam bukunya *How the World Works: A Brief Survey of International Relations*, yaitu<sup>42</sup>:

1. Sistem internasional

Sistem internasional atau lingkungan eksternal dapat menjadi sumber dari kebijakan luar negeri suatu negara. Situasi/struktur internasional yang ada yang

---

<sup>38</sup> Jack C. Plano dan Roy Olton diterjemahkan oleh Wawan Juanda, *The International Relations Dictionary*, 3<sup>rd</sup> edition (England: Clio Press, Ltd, 1982), 5.

<sup>39</sup> Jonathan Wilkenfeld, et al, *Foreign Policy Behavior the Interstate Behavior Analysis Model*, (London: Sage, 1980), 100.

<sup>40</sup> K.J. Holsti, *International Politics, A framework for Analysis*, 4<sup>th</sup> Edition, (London: Prentice Hall, 1983), 97

<sup>41</sup> George Modelski, *A Theory of Foreign Policy*, (New York: Praegar, 1962), 6.

<sup>42</sup> Russell Bova, *How the World Works: A Brief Survey of International Relations*, (Boston: Pearson Education, Inc), 69-81.

terbentuk dari interaksi antar negara akan menjadi pertimbangan negara dalam bersikap dan mengambil kebijakan luar negeri.

## 2. Negara

Merupakan sumber domestik dari suatu negara seperti karakteristik suatu negara dan masyarakatnya yang membentuk bagaimana negara akan bertindak dalam arena internasional. Lima variabel utama yang dijelaskan Bova dalam sumber negara antara lain adalah tipe pemerintahan, performa dan sistem ekonomi, gaya nasional (geografis dan pengalaman sejarah), identitas budaya, serta kelompok kepentingan dan opini publik.

## 3. Individu

Dalam *the great man theory of history*, yang menunjukkan bahwa sejarah manusia tidak hanya ditentukan oleh sosial, politik, dan kekuatan ekonomi yang lebih besar namun juga oleh kepercayaan dan karakter individu yang menempati posisi berpengaruh. Sumber ini menitikberatkan pada sumber pengaruh individu dalam kebijakan luar negeri seperti kepribadian individu, karakter, sistem kepercayaan, atribut kepribadian, hingga gaya kepemimpinan.

Dalam penelitian ini, hal yang akan dijelaskan dan dianalisis adalah mengenai gaya kepemimpinan Narendra Modi dalam kebijakan pencabutan otonomi Kashmir. Menurut Barber, bahwa gaya kepemimpinan seringkali merupakan hasil dari perilaku yang berguna dalam mengamankan kesuksesan awal seorang pemimpin, kemudian pemimpin tersebut akan mengandalkannya sepanjang waktu untuk mencapai kesuksesan kedua, ketiga, dan seterusnya.<sup>43</sup> Gaya kepemimpinan yang diadopsi oleh seorang pemimpin dapat mempengaruhi mereka

---

<sup>43</sup> James David Barber, *The Presidential Character*, (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1977), 8.

dalam menghadapi dilema dalam pemerintahannya dan sifat dari proses pengambilan keputusan pada kompleksnya pengambilan kebijakan seperti bagaimana mempertahankan kendali dan bagaimana membentuk agenda politik sedangkan dikelilingi oleh orang-orang yang juga bekerja untuk itu.<sup>44</sup> Hermann menjelaskan bahwa intinya gaya kepemimpinan merupakan cara-cara yang dilakukan pemimpin yang berhubungan dengan orang-orang di sekitar mereka dan bagaimana mereka menyusun interaksi serta norma, aturan, dan prinsip-prinsip yang mereka gunakan untuk mengarahkan interaksi tersebut.<sup>45</sup>

### 1.7.2 *Predominant Leaders*

*Predominant leader* (pemimpin yang dominan) merupakan suatu karakteristik pemimpin yang dapat membentuk apa yang mereka dorong dalam pemerintahan mereka, dan sifat dampaknya terhadap kebijakan.<sup>46</sup> Secara garis besar terdapat dua tipe gaya kepemimpinan yaitu *goal-driven* dan *situationally/contextually responsive*. Pemimpin yang lebih *goal-driven* (didorong oleh tujuan) yaitu *the crusaders*, *the ideologues*, dan mereka yang direktif, *task-oriented*, atau *transformational in focus* menginterpretasikan lingkungan melalui lensa yang dibentuk oleh kepercayaan mereka, perilaku, motif, dan semangat (*passion*). Orang yang bercirikan gaya ini hidup dalam kebenaran diri sendiri yang ditentukan oleh kesesuaian antara siapa mereka dan apa yang mereka lakukan.<sup>47</sup>

Kemudian, pemimpin *situationally/contextually responsive* atau yang lebih responsif terhadap situasi yang ada yaitu *the pragmatists*, *the opportunists*, dan

---

<sup>44</sup> Margaret G. Hermann, "Assessing Leadership Style: A Trait Analysis," *Social Science Automation*, (1999): 4-5.

<sup>45</sup> Hermann, 5.

<sup>46</sup> Margaret G. Hermann, dkk, "Who Leads Matters: The Effects of Powerful Individuals," *International Studies Review* Vol. 3, No. 2, (2001): 83-84.

<sup>47</sup> Hermann, dkk, 86-87

mereka yang konsultatif, *relations-oriented*, atau *transactional* cenderung untuk berperan seperti pujangga yang melihat kehidupan sebagai sebuah teater yang terdapat banyak peran untuk dimainkan. Pemimpin seperti ini mencirikan diri mereka sebagai seorang yang fleksibel dan berpikiran terbuka (*open minded*). Mereka cenderung menyesuaikan perilaku dengan tuntutan situasi, memastikan posisi orang lain dalam suatu masalah dan memperkirakan bagaimana kelompok dan institusi cenderung bertindak. Pada intinya, citra diri pemimpin tersebut ditentukan oleh ekspektasi dan kepentingan orang lain. Agar dapat diterima, ide, sikap, keyakinan, motif dan semangat (*passion*) harus menerima validasi pihak eksternal dan konstituen lain yang relevan.<sup>48</sup>

Lebih lanjut Hermann, dkk menjelaskan dua gaya kepemimpinan ini dalam diri seorang pemimpin yang dominan yang memiliki perbedaan-perbedaan tindakan. Pemimpin dominan yang *contextually responsive* akan lebih terkendala dengan pengaturan domestik tertentu di mana mereka berada pada rekan-rekannya yang lebih berorientasi pada tujuan. Mereka lebih kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam konflik dan enggan untuk menggunakan sumber daya negara untuk berperang kecuali jika pilihan tersebut mendapat dukungan dari unsur penting lainnya. Pemimpin yang *contextually responsive* cenderung mencari dukungan untuk keputusan internasional mereka, tertarik pada pendekatan pembangunan konsensus dan multilateral dalam kebijakan luar negeri dan akan merasa nyaman dengan pilihan yang mendapatkan dukungan. Pemimpin dominan yang *contextually responsive* cenderung diarahkan ke dalam tindakan konflik atau kooperatif daripada melobi untuk menginisiasi.

---

<sup>48</sup> Hermann, dkk, 87-88.



Kemudian, pemimpin dominan yang didorong oleh tujuan (*goal-driven*) datang ke masalah kebijakan luar negeri dengan perspektif atau seperangkat prioritas kebijakan tertentu. Pemimpin seperti itu akan menafsirkan dan mendesain ulang situasi di mana tujuan dan prinsip-prinsip mereka mendefinisikan apa yang penting dalam kebijakan luar negeri. Isu-isu tertentu baik penurunan ekonomi, keamanan militer, imigrasi ilegal, dll membentuk pandangan pemimpin ini mengenai prioritas eksternal mereka dan postur mereka terhadap aktor lain. Tantangan merupakan sesuatu yang harus diatasi dan ditangani dan bukan hal yang harus diterima. Pemimpin dominan yang didorong oleh tujuan dengan penuh semangat mencoba berbagai manuver untuk menarik pembuatan kebijakan sepenuhnya di bawah arahan mereka.

Margaret G. Herman, dkk memberikan 3 variabel utama dalam menilai sensitivitas seorang pemimpin terhadap konteks politik atau untuk menentukan apakah ia seorang *contextually responsive* atau *goal-driven* dan bagaimana pemimpin tersebut membuat keputusan<sup>49</sup>:

- *Reaction to Political Constraints* (reaksi terhadap kendala politik)

Pemimpin merupakan seorang negosiator yang dapat menggerakkan pemerintah dan negara menuju beberapa tindakan luar negeri yang dapat dipengaruhi oleh kendala domestik dan internasional. Para pemimpin dipandang memainkan peran penting dalam tawar-menawar untuk membentuk konsensus antara konstituen domestik dan mitra internasional pada pilihan tertentu. Para pemimpin dapat menggunakan kebijakan luar negeri untuk mengalihkan perhatian dari oposisi, untuk mengakomodasi oposisi, atau untuk kooptasi dengan posisi

---

<sup>49</sup> Hermann, dkk, 89-94.

oposisi; yang mana setiap strategi mempengaruhi karakter keputusan. Seorang pemimpin dapat menjadi sangat aktif dalam berurusan dengan hambatan-hambatan politik di lingkungannya. Pemimpin yang *goal-driven* (kurang sensitif) akan lebih nyaman berada dalam pengaturan di mana mereka memegang kendali dan dapat mengatur kriteria tindakan, sedangkan pemimpin yang *contextually responsive* (lebih sensitif) akan meningkatkan toleransi untuk pembagian kekuasaan dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan persetujuan dari yang diatur.

- *Openness to Information* (keterbukaan terhadap informasi)

Pemimpin dominan yang responsif secara kontekstual (*contextually responsive*) cenderung menjadi penguji hipotesis atau penerima isyarat dalam menanggapi masalah kebijakan luar negeri, mencari informasi dari latar politik sebelum mendesak suatu tindakan; mereka akan relatif terbuka untuk informasi yang masuk. Sedangkan, pemimpin dominan yang didorong oleh tujuan (*goal-driven*) akan memaksakan agendanya dan menggunakan pandangannya tentang bagaimana seharusnya menyesuaikan informasi; mereka melihat dengan apa yang diinginkan dan secara relatif akan dekat kepada kisaran informasi yang tersedia.

- *Motivation for Action* (motivasi untuk bertindak)

Motivasi membentuk karakter pemimpin, apa yang penting dalam hidup mereka, dan membawa mereka ke dalam tindakan. Terdapat dua hal yang membentuk motivasi yaitu, *internal focus/problem focus* (masalah atau sebab tertentu, ideologi, seperangkat kepentingan spesifik) dan keinginan untuk mendapatkan umpan balik dari lingkungan/*relationship focus* (mencari penerimaan, persetujuan, kekuasaan, dukungan, status, atau tepuk tangan). Pemimpin yang fokus dengan masalah dan penyebab merupakan yang kurang peka

terhadap konteks politik; mereka tahu apa yang perlu dilakukan dan kemudian melakukannya. Sedangkan, pemimpin yang tertarik untuk membangun hubungan (*relationship focus*) lebih peka terhadap konteks politik karena melalui interaksi dengan orang lain mereka akan merasa puas.

Hermann, dkk juga menjelaskan delapan gaya kepemimpinan dari analisis tiga variabel di atas, seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Gaya Kepemimpinan sebagai Sebuah Fungsi terhadap Responsiveness to Constraints, Openness to Information, dan Motivation.**

<i>Responsiveness to Constraints</i>	<i>Openness to Information</i>	<i>Motivation</i>	
		<i>Problem Focus</i>	<i>Relationship Focus</i>
Menantang hambatan (seorang <i>crusader</i> )	Tertutup terhadap informasi	<i>Expansionistic</i>	<i>Evangelistic</i>
Menantang hambatan (secara umum seorang <i>strategic</i> )	Terbuka terhadap informasi	<i>Incremental</i>	<i>Charismatic</i>
Menghargai hambatan (cenderung ke arah pragmatisme)	Tertutup terhadap informasi	<i>Directive</i>	<i>Consultative</i>
Menghargai hambatan (seorang <i>opportunistic</i> )	Terbuka terhadap informasi	<i>Reactive</i>	<i>Accommodative</i>

Sumber: Margaret G. Hermann, dkk. (2001)<sup>50</sup>

Cara-cara pemimpin berurusan dengan hambatan politik dan informasi dijelaskan ke dalam empat bentuk gaya kepemimpinan yaitu seorang *crusader*, *strategic*, pragmatis, dan *opportunistic*. Seorang *crusader* merupakan tipe pemimpin yang tidak menunggu waktu tepat untuk melakukan sesuatu. Ketika informasi yang ada mendukung posisi mereka, mereka akan membuat alasan yang sangat persuasif untuk apa yang mereka lakukan yang memberikan kredibilitas dan

<sup>50</sup> Hermann, Margaret G., dkk, 95.

legitimasi. Sebaliknya, seorang pemimpin oportunistis (*opportunistic*) merupakan yang paling sensitif terhadap konteks politik yang dapat digambarkan seperti kalimat '*politics is the art of the possible in the current setting and time*'.

Kemudian, pemimpin *strategic* merupakan mereka yang tahu apa yang mereka lakukan di mana informasi dicari berkesesuaian dengan apa yang paling layak saat ini untuk mencapai suatu tujuan. Pemimpin yang strategis akan meminimalisir kerugian/risiko dengan mencapai tujuan mereka. Selanjutnya, pemimpin pragmatis (*pragmatic*) merupakan pemimpin yang berada dalam dilema karena keadaan dari hambatan politik dan lingkungan di mana mereka harus menyesuaikan diri dan bekerja di lain sisi mereka memiliki ide sendiri dalam menjalankan pemerintahan.

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jika seorang pemimpin cenderung menantang hambatan dan tertutup terhadap informasi (seorang *crusader*), serta memiliki motivasi yang berfokus pada masalah maka dapat diklasifikasikan sebagai *expansionistic*. Seorang pemimpin *expansionistic* akan fokus pada perluasan kekuatan dan pengaruh, sedangkan *evangelistic* pemimpin fokus membujuk orang lain menerima suatu pesan dan sebab. Pemimpin *expansionistic* dan *evangelistic* tidak terlalu peduli tentang lingkungan politik di sekitar mereka kecuali hal itu menghambat kemajuan mereka menuju tujuannya. Pemimpin *incremental* fokus mempertahankan satu kemampuan bergerak dan fleksibilitas sementara menghindari rintangan-rintangan yang menghalangi, sedangkan *charismatic* fokus pada pencapaian suatu agenda dengan melibatkan orang lain dalam proses dan membujuk mereka untuk bertindak. Pemimpin *incremental* dan *charismatic* mempromosikan perilaku strategis dan musyawarah; pengaturan dan keadaan



tertentu membentuk bagaimana pemimpin ini akan bekerja untuk mencapai tujuan mereka.<sup>51</sup>

Pemimpin *directive* fokus pada pengarahan kebijakan secara personal bersamaan dengan jalur yang konsisten dengan suatu pandangan sendiri sembari tetap bekerja dalam norma dan aturan pada posisi saat ini, sedangkan pemimpin *consultative* fokus pada pemantauan orang lain yang penting akan mendukung atau menentang, apa yang ingin dilakukan di situasi tertentu. Bagi pemimpin *directive* dan *consultative* penting bagi mereka untuk menjadi pusat jaringan informasi apapun sehingga mereka dapat memantau siapa yang mendukung atau menentang apa yang menurut mereka harus dilakukan. Pemimpin *reactive* fokusnya adalah menilai apa yang mungkin dalam situasi saat ini yang mendasari permasalahan dan menimbang konstituen penting yang memungkinkan, sedangkan pemimpin *accommodative* fokusnya adalah rekonsiliasi perbedaan dan membangun konsensus, pemberdayaan pihak lain dan berbagi akuntabilitas dalam proses. Pemimpin *reactive* dan *accommodative* berusaha menjadi rasional karena mereka mencoba untuk memaksimalkan apa yang mungkin sementara meminimalkan biaya.<sup>52</sup>

Dari konsep *predominant leaders* yang dijelaskan oleh Margaret G. Hermann, dkk, penulis menganggap konsep tersebut relevan untuk menganalisis permasalahan pada penelitian ini. Konsep ini mampu mengakomodir penjelasan mengenai kepemimpinan seorang pemimpin yang dominan dalam proses pembuatan kebijakan suatu negara yang menggambarkan tipe-tipe kepemimpinan seseorang dan bagaimana cara pemimpin tersebut dalam memainkan perannya

---

<sup>51</sup> Hermann, Margaret G., dkk, 98-99.

<sup>52</sup> Hermann, Margaret G., dkk, 99-100.

sebagai aktor politik yang berpengaruh. Konsep ini menjelaskan dua tipe umum kepemimpinan pemimpin dominan yaitu *contextually responsive* dan *goal-driven*.

Kemudian Hermann, dkk memberikan tiga variabel analisis dalam mengetahui tipe kepemimpinan seorang pemimpin tersebut yaitu *reaction to political constraints*, *openness to information*, dan *motivation for action*. Tiga variabel tersebut dapat menjelaskan bagaimana gaya kepemimpinan Narendra Modi dalam kebijakan pencabutan otonomi Kashmir yaitu melalui reaksinya terhadap hambatan politik baik secara internasional maupun domestik, keterbukaannya terhadap informasi yang tersedia dalam permasalahan ini, sampai pada motivasi Narendra Modi dalam kebijakan ini. Selanjutnya juga melalui penilaian tiga variabel tersebut dijelaskan empat gaya kepemimpinan hasil dari analisis variabel *responsive to constraints* dan *openness to information* dan delapan bentuk gaya kepemimpinan dilihat dari motivasi pemimpin tersebut yang mencirikan kepemimpinan seorang pemimpin yang dominan.

## **1.8 Metodologi Penelitian**

### **1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, metode atau pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini mencoba untuk mengkonstruksi realitas yang menekankan pada kedalaman makna dan data dalam penelitian bukan pada perluasan data. Pendekatan kualitatif juga menggunakan bahasa penelitian berbentuk deskriptif atau penjelasan dan bersifat formal dan impersonal melalui angka dan data statistik.<sup>53</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh dan memahami proses pengambilan kebijakan India dan peran dari individu pemimpin

---

<sup>53</sup> Merriam, dalam Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif," Makara Sosial Humaniora Vol. 9, No. 2 (2005): 57-65.

dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Metode kualitatif dipilih untuk memfokuskan pemahaman mengenai bagaimana gaya kepemimpinan Narendra Modi berkorelasi dengan proses kebijakan luar negeri India dalam kasus pencabutan otonomi Kashmir. Kemudian, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis yang menjabarkan secara deskriptif mengenai kasus yang sedang diteliti melalui ucapan, tulisan, maupun tingkah laku dari Narendra Modi.

### **1.8.2 Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, batasan dibagi menjadi dua macam yaitu batasan isu dan batasan waktu. Batasan isu penelitian ini difokuskan pada gaya kepemimpinan Narendra Modi dalam kebijakan pencabutan otonomi Kashmir. Batasan waktu penelitian adalah tahun 2014-2020. Tahun 2014 dipilih sebagai awal permulaan karena pada tahun tersebut Narendra Modi mulai menjabat sebagai perdana menteri India dan melakukan strategi pendekatan terhadap Kashmir serta mulai fokus dalam upaya janji kampanyenya untuk mencabut Artikel 370. Tahun 2020 dipilih sebagai batasan akhir karena pasca pencabutan otonominya, Kashmir masih mendapat perhatian luas dunia internasional hingga saat ini. Rentang tahun 2014-2020 dianggap ideal karena usaha dalam pengeluaran kebijakan ini membutuhkan waktu yang lama.

### **1.8.3 Unit Analisis, Unit Eksplanasi, dan Tingkat Analisis**

Unit analisis adalah objek kajian yang perilakunya akan dijelaskan, dideskripsikan dan dianalisis. Sedangkan, unit eksplanasi merupakan unit yang dapat mempengaruhi perilaku unit analisis. Dalam penelitian ini, unit analisisnya

adalah kepemimpinan Narendra Modi. Untuk unit eksplanasinya adalah status Kashmir. Sedangkan, tingkat analisis pada penelitian ini adalah individu.

#### 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder dalam mencari informasi dan data yaitu melalui buku, artikel jurnal, publikasi, dokumen pemerintah India, dan sumber berita dari internet. Adapun pengumpulan data dari penelitian ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan dengan mempelajari dan menganalisa tulisan-tulisan serta literatur yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun sumber-sumber tersebut didapatkan melalui jurnal nasional maupun internasional terkait konflik Kashmir untuk mendapatkan informasi terkait isu Kashmir, dinamika konflik Kashmir, dan kebijakan India terhadap Kashmir terutama mengenai pembahasan pencabutan otonomi Kashmir serta artikel-artikel jurnal yang dipublikasikan oleh South Asian Studies, South Asia Research oleh SAGE Journals, South Asia: Journal of South Asian Studies oleh Routledge, dan Strategic Studies.

Selain itu buku-buku yang penulis gunakan seperti *Kashmir in Conflict: India, Pakistan, and the Unending War* oleh Victoria Schofield, *Kashmir: Roots of Conflict, Paths to Peace* oleh Sumantra Bose dan buku biografi Narendra Modi yang ditulis oleh Lance Price yang berjudul *Narendra Modi: Jelata Yang Meruntuhkan Dominasi Politik Elitis*. Data-data juga diperoleh melalui situs-situs resmi pemerintah India berupa teks pidato maupun pernyataan dari Narendra Modi. Selain itu situs online seperti *southasiajournal.net* yang membahas isu-isu kebijakan di Asia Selatan terutama terkait konflik Kashmir, serta situs berita online seperti *Indiatimes.com*, *Hindustantimes*, CNN, BBC, Detik.com, Republika, al-



Jazeera, dan lain-lain. Kata kunci yang peneliti gunakan dalam mencari sumber data dan informasi adalah Kashmir, konflik Kashmir, Narendra Modi, Narendra Modi and Kashmir, *Article 370 abrogation*, dan Narendra Modi's Speech on Kashmir.

### 1.8.5 Teknik Analisis Data

Menurut Moleong, analisis data merupakan proses pengorganisasian data untuk memperoleh suatu pola atau bentuk-bentuk keteraturan.<sup>54</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis isi/*content analysis*. Teknik analisis isi memungkinkan peneliti untuk mengkaji perilaku manusia secara tidak langsung melalui analisis terhadap komunikasi mereka melalui buku teks, lagu, novel, artikel majalah, koran, esai, gambar iklan, percakapan, dan semua jenis komunikasi yang dapat dianalisis.<sup>55</sup> Hermann juga menjelaskan bahwa untuk memahami bagaimana gaya kepemimpinan seorang pemimpin cara yang terbaik adalah dengan menelaah apa yang mereka katakan.<sup>56</sup> Analisis isi juga merangkum prosedur dan tata cara untuk memproses data ilmiah dalam memberikan bentuk tujuan baik berupa pengetahuan, membuka wawasan baru, hingga menyajikan fakta.<sup>57</sup>

Metode yang digunakan adalah analisis isi kualitatif. Analisis isi kualitatif menekankan pada identifikasi pola-pola relevan pada data dan mengkarakterisasi fenomena bukan pada perluasan data dan tes uji statistik seperti pendekatan analisis isi kuantitatif.<sup>58</sup> Secara umum, Metode analisis isi kualitatif tidak jauh

---

<sup>54</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya, 1989), 112-113.

<sup>55</sup> Jack R. Fraenkel, dan Norman E. Wallen, *How to Design and Evaluate. Research in Education 8<sup>th</sup> Edition* (Boston: McGraw-Hill Higher Education, 2012), 478.

<sup>56</sup> Hermann, 1-3.

<sup>57</sup> Klaus Krippendoff, *Analisis Isi Pengantar Dan Teori Metodologi* (Jakarta: Rajawali Press, 1993), 15.

<sup>58</sup> White, 23-35.

berbeda dengan analisis isi kuantitatif yaitu dalam metode ini tetap dibutuhkan sampel dan *coding*<sup>59</sup>, sehingga metode analisis diawali dengan pengumpulan data atau sampel teks yang sesuai. Setelah data dikumpulkan, penulis akan melakukan *coding* menggunakan tahapan yang dijelaskan oleh Robert K. Yin yaitu tahapan pertama (*initial code*) dan tahapan kedua (*category code*). Tahapan pertama dimulai dengan pemberian label/nama pada data wawancara/pidato maupun data lainnya. Kemudian, tahapan kedua lebih mengkategorisasikan label/nama yang telah dilakukan pada tahapan pertama. Selanjutnya, penulis akan membentuk pola-pola yang telah didapatkan pada tahap pertama dan kedua untuk melihat keterkaitan pola-pola yang ada dengan konsep yang telah dijelaskan.<sup>60</sup>

**Tabel 1.2 Koding Variabel Konsep *Predominant Leaders***

Variabel	Kata kunci	Kategori
Reaksi terhadap hambatan politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengalihkan perhatian dari oposisi</li> <li>- Menentang oposisi</li> <li>- Pengaturan terhadap kendali dan kriteria tindakan</li> <li>- Tertutup untuk menanggapi tuntutan konstituen domestik dan internasional</li> <li>- Pengatasan hambatan</li> <li>- Bersikap tegas dan mencapai resolusi cepat untuk masalah yang mereka hadapi</li> </ul>	Menantang hambatan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kooptasi dengan oposisi</li> <li>- Mengakomodasi oposisi</li> <li>- Terbuka untuk menanggapi tuntutan konstituen domestik dan internasional</li> <li>- Melihat konteks politik dari hambatan yang ada</li> <li>- Lebih menghargai masalah yang dihadapi dengan negosiasi dan pemberian waktu</li> </ul>	Menghargai hambatan
Keterbukaan terhadap informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaksakan agenda dan pandangannya</li> <li>- Visi dan agenda yang <i>well-formulated</i></li> <li>- Mengabaikan bukti informasi</li> </ul>	Tertutup terhadap informasi

<sup>59</sup> Marilyn Domas White, Emily E. Marsh, "Content Analysis: A Flexible Methodology", *Library Trends*, Vol 55, No 1, (2006): 22-45.

<sup>60</sup> Yin K. Robert, *Qualitative Research from Start to Finish*, (New York: The Guilford Press, 2011) 186-190.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diarahkan oleh pandangan sempit</li> <li>- Informasi dari atas ke bawah (<i>top-down</i>)</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menguji hipotesis atau mengambil isyarat dalam konteks politik</li> <li>- Mempelajari situasi sebelum memilih tanggapan</li> <li>- Mencari pandangan dan isyarat politik</li> <li>- Pandangan yang terbuka</li> <li>- Penggalan informasi dari bawah ke atas (<i>bottom-up</i>)</li> </ul>	Terbuka terhadap informasi
Motivasi dalam bertindak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dipengaruhi kepentingan spesifik</li> <li>- Dipengaruhi oleh ideologi/kepercayaan</li> <li>- Menonjolkan kemampuan diri dalam mencapai tujuan</li> <li>- Mobilisasi tujuan</li> </ul>	Fokus pada masalah/internal
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fokus terhadap umpan balik lingkungan</li> <li>- Membangun konsensus</li> <li>- Membangun jaringan</li> <li>- Memelihara citra baik</li> <li>- Memberdayakan orang lain yang memiliki kemampuan interpersonal</li> <li>- Peka terhadap kepentingan orang lain</li> </ul>	Fokus pada hubungan/ <i>relationship</i>

Sumber: Diolah peneliti. (2020)

Analisis isi kualitatif menekankan pada identifikasi pola-pola relevan pada data dan mengkarakterisasi fenomena bukan perluasan data dan tes uji statistik seperti pendekatan analisis isi kuantitatif.<sup>61</sup> Dari tabel di atas, akan dilakukan analisis terkait pernyataan Narendra Modi terkait kebijakan terhadap Kashmir terutama pada kebijakan pencabutan otonomi Kashmir. Pola-pola yang akan dilihat adalah dari kata kunci pada setiap variabel yang ada. Setelah itu, penulis melakukan pengumpulan data melalui kepingan-kepingan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Proses tersebut membantu penulis dalam menemukan tulisan-tulisan dengan keragaman perspektif, konteks, maupun ide melalui penggunaan beragam teks dan sumber yang terkait dengan penelitian ini.

<sup>61</sup> White, 23-35.

## **1.9 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan dan diuraikan mengenai pendahuluan penelitian di antaranya adalah: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Studi Kepustakaan, Kerangka Konseptual, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

### **BAB II : KONFLIK KASHMIR DAN INDIA**

Pada bab ini dijelaskan mengenai sejarah dan dinamika konflik Kashmir, sejarah pembentukan otonomi Kashmir melalui Artikel 370 oleh India, serta kebijakan India terhadap Kashmir masa pemerintahan PM Vajpayee hingga Narendra Modi.

### **BAB III : KEBIJAKAN PENCABUTAN OTONOMI KASHMIR PADA MASA PEMERINTAHAN NARENDRA MODI**

Pada bab ini membahas mengenai dasar kebijakan pencabutan otonomi Kashmir pada tahun 2019 dan profil Narendra Modi mulai dari masa kecil hingga remaja, kehidupan dewasa dan masa Narendra Modi aktif dalam BJP, masa Narendra Modi aktif dalam perpolitikan India, hingga menjabat sebagai PM India.

### **BAB IV : GAYA KEPEMIMPINAN NARENDRA MODI DALAM KEBIJAKAN INDIA MENGENAI PENCABUTAN OTONOMI KASHMIR TAHUN 2019**

Pada bab ini, peneliti akan memberikan analisis tentang gaya kepemimpinan Narendra Modi dalam kebijakan India mengenai pencabutan otonomi Kashmir melalui konsep *predominant leaders* dengan tiga variabel analisis yang dijelaskan



oleh Margaret G. Hermann, dkk yaitu *reaction to political constraints, openness to information*, dan *motivation for action*.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan penelitian terkait gaya kepemimpinan Narendra Modi dalam kebijakan India mengenai pencabutan otonomi Kashmir tahun 2019.

